

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

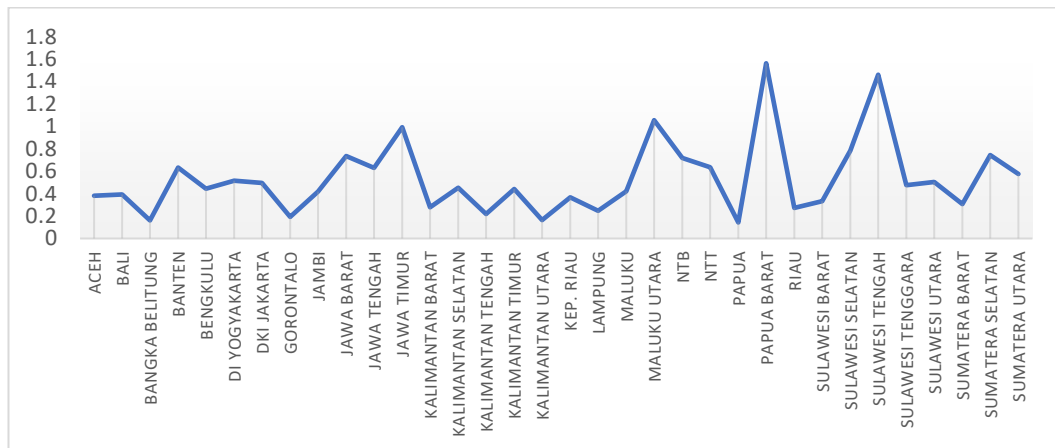
Ketidakmerataan pembangunan antarwilayah pada dasarnya mencerminkan belum optimalnya distribusi hasil pembangunan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan yang idealnya memberikan manfaat secara merata kepada masyarakat di berbagai daerah, pada kenyataannya masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur, aksesibilitas, maupun kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan sebagian wilayah tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya, sehingga memunculkan kesenjangan dalam capaian pembangunan ekonomi antardaerah (Suparman et al., 2023)

Sebagai negara yang sedang berkembang, tujuan utama Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia, pembangunan daerah yang merata masih menjadi masalah struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan cakupan wilayah yang luas serta kondisi geografis yang beragam, mulai dari daerah pegunungan, pesisir, hingga wilayah pedalaman. Perbedaan karakteristik wilayah tersebut mendorong munculnya ketimpangan pembangunan, di mana sebagian wilayah berkembang pesat seperti pusat gravitasi pertumbuhan, sementara daerah lain seolah tertinggal dalam arus utama pembangunan (Rahanubun et al., 2025)

Pembangunan pada hakikatnya tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan martabat manusia, dan memperluas kebebasan masyarakat. Tujuan pokok pembangunan mencakup upaya untuk memperluas ketersediaan dan memperlancar distribusi berbagai kebutuhan dasar masyarakat, perbaikan standar hidup masyarakat, serta perluasan alternatif pilihan dalam bidang ekonomi maupun sosial (Hasbi, 2022)

Perbedaan potensi sumber daya antar wilayah menyebabkan perbedaan dalam program pembangunan yang dilaksanakan. Karena potensi wilayah yang beragam, pelaksanaan pembangunan juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, perbedaan tersebut kemudian berpengaruh pada tingkat perkembangan wilayah yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Secara keseluruhan, wilayah yang paling banyak mendapatkan fokus pembangunan di Indonesia adalah Pulau Jawa. Sekitar 60% aktivitas perekonomian nasional berasal dari Pulau Jawa, data BPS menunjukkan Jawa mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96% pada tahun 2023 (BPS, 2023). Secara historis Pulau Jawa telah menjadi episentrum pembangunan nasional, ditandai dengan konsentrasi penduduk, industri, pusat pemerintahan, dan infrastruktur modal yang sangat tinggi. Sementara itu, banyak wilayah di luar Jawa yang meskipun kaya akan sumber daya alam, masih terbelakang dalam hal infrastruktur, kualitas layanan publik, maupun kualitas sumber daya manusia (Rahayu et al., 2025).

Ketimpangan dapat memicu berbagai dampak negatif, antara lain menurunnya efisiensi ekonomi, rendahnya produktivitas daerah tertinggal, dan tingginya ketimpangan sering dipandang sebagai kondisi yang tidak adil. Dampak-dampak negatif inilah yang kemudian menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, disparitas antar wilayah (*regional disparity*) muncul sebagai efek dari alokasi pembangunan ekonomi yang tidak merata. Kondisi tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan dalam level kemajuan antara wilayah pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran. Namun ketimpangan juga memberikan manfaat yaitu kemampuannya untuk mendorong daerah yang kurang berkembang, untuk meningkatkan persaingan dan memperbaiki laju pertumbuhan mereka yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian kemakmuran (Zusanti et al., 2020). Ketimpangan antar wilayah umumnya dianalisis menggunakan Indeks Williamson sebagai ukuran variasi pembangunan regional.



Gambar 1.1 Indeks Williamson Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Sumber: Data Diolah dari BPS, 2023

Nilai indeks Williamson Indonesia pada tahun 2017 yaitu 0.484 lalu meningkat menjadi 0.534 pada tahun 2023. Berdasarkan gambar 1.1 hasil penghitungan Indeks Williamson pada data antar provinsi-provinsi, terlihat bahwa ketimpangan wilayah di Indonesia masih berada pada tingkat yang cukup tinggi. Provinsi Papua Barat mencatat nilai Indeks Williamson tertinggi sebesar 1.564, disusul oleh Sulawesi Tengah sebesar 1.460 dan Maluku Utara sebesar 1.056, yang mencerminkan ketimpangan internal yang sangat parah akibat konsentrasi kegiatan ekonomi yang hanya dinikmati oleh sebagian kecil wilayah dalam provinsi tersebut, sementara wilayah-wilayah pedalaman dan kepulauan disekitarnya jauh tertinggal. Provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa seperti Jawa Timur 0.993, Jawa Barat 0.735, dan Jawa Tengah 0.631 juga mencatat nilai yang relatif tinggi, kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ketiga provinsi tersebut memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang cukup baik, masih terdapat perbedaan pembangunan dan pendapatan yang cukup besar antar wilayah di dalam provinsi tersebut. Sebaliknya, Kalimantan Utara mencatat nilai terendah sebesar 0.149, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0.162 dan Gorontalo sebesar 0.194. Nilai yang rendah ini menunjukkan bahwa distribusi PDRB per kapita antar wilayah di provinsi-provinsi tersebut cenderung lebih merata.

Tingkat kemakmuran dan keberhasilan suatu daerah yang terangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya berakar dari sejauh mana kapasitas masyarakat di area tersebut terbentuk. Guna mengukur kemajuan wilayah

secara utuh, indikator IPM digagas oleh UNDP sejak 1990 dengan menyoroti tiga pilar esensial, yaitu akses layanan kesehatan, mutu pendidikan, serta kelayakan ekonomi (Aprilianti & Harkeni, 2021). Menurut doktrin awal pembangunan manusia oleh UNDP pada kurun waktu tersebut, fokus utama dari proses ini ialah menciptakan iklim yang memungkinkan setiap individu hidup sehat, bertahan lebih lama, serta mengaktualisasikan potensinya secara produktif dan inovatif (Tremblay et al., 2016).

Wilayah dengan kapasitas anggaran yang memadai dapat secara bebas mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Investasi ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan IPM wilayah tersebut. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas menghadapi kendala dalam menyediakan layanan dasar yang memadai, sehingga memperlambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (Nisa et al., 2025). Perbedaan IPM berpengaruh pada ketimpangan wilayah karena kualitas SDM menentukan produktivitas, kapasitas fiskal, dan daya tarik investasi suatu daerah. Hal ini semakin memperkuat disparitas antar wilayah, karena daerah dengan IPM tinggi cenderung terus berkembang, sementara daerah dengan IPM rendah sulit mengejar ketertinggalannya.

Di Indonesia tren IPM secara nasional menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa IPM Indonesia secara nasional mencapai 74,39 pada tahun 2023 (BPS, 2023). Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengindikasikan semakin baiknya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Peningkatan kualitas tersebut mencerminkan perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang layak, yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing Masyarakat.

IPM antar provinsi di Indonesia pada tahun 2023 masih menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Provinsi DKI Jakarta mencatat nilai IPM tertinggi sebesar 82,46, diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 81,07. Sementara itu, Provinsi Papua Barat memiliki nilai IPM terendah sebesar 66,16, disusul Papua sebesar 72,41 dan Nusa Tenggara Timur sebesar 68,68 (BPS, 2023). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kualitas pengembangan sumber daya manusia di Indonesia

masih belum merata di berbagai wilayah, tingginya nilai IPM di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memperoleh kemudahan yang lebih besar terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, rendahnya nilai IPM di beberapa provinsi kawasan timur Indonesia mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam akses kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang menjadi komponen utama penyusun IPM.

Penelitian Liu et al. (2023) menunjukkan perbedaan tingkat keberhasilan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dapat mempengaruhi variasi pembangunan manusia antar wilayah. Melalui analisis HDI provinsi di Tiongkok periode 1982-2015, mereka menemukan bahwa meskipun seluruh wilayah mengalami peningkatan IPM, kesenjangan antar daerah tetap muncul karena kontribusi masing-masing komponen HDI berbeda antar wilayah. Studi Azim et al. (2022) menandakan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia yang ditempuh perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan standar kehidupan yang layak merupakan instrumen strategis dalam mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

Selain Pembangunan manusia, ketimpangan wilayah juga berkaitan erat dengan pendapatan asli daerah (PAD), merupakan elemen pendapatan daerah yang berasal dari potensi ekonomi di setiap wilayah, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil dari pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan sumber pendapatan daerah yang sah lainnya (DJP, 2024). PAD antar daerah di Indonesia masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar, daerah dengan basis ekonomi yang kuat cenderung memiliki kemampuan menghimpun PAD yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang aktivitas ekonominya masih terbatas. Perbedaan kemampuan fiskal tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah.

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor penting dalam mendukung proses pembangunan. Besarnya PAD yang diperoleh daerah mencerminkan semakin kuatnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan menyediakan berbagai layanan

publik yang dibutuhkan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta menciptakan peluang pembangunan yang lebih merata antar wilayah (Khusaini, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) antarprovinsi di Indonesia pada tahun 2023 juga menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Total PAD yang dihimpun oleh pemerintah provinsi mencapai Rp202,132 triliun, dengan DKI Jakarta mencatat penerimaan tertinggi sebesar Rp49,14 triliun atau sekitar 24,3 persen dari total PAD provinsi. Sebaliknya, Sulawesi Barat memiliki PAD sebesar Rp464 miliar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah provinsi dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber penerimaan daerah masih berbeda antardaerah (DJPK, 2024). Provinsi-provinsi di kawasan timur secara konsisten berada di kelompok bawah, mencerminkan rendahnya basis ekonomi dan kapasitas perpajakan daerah di wilayah tersebut.

Studi Ramadhani et al. (2025) menunjukkan daerah yang memiliki PAD lebih besar cenderung lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sedangkan daerah dengan PAD terbatas masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat, dan ketimpangan ini diperbesar oleh mekanisme dana transfer yang kurang memadai. Penelitian lain dari Aprilianti & Harken (2021) menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum mampu mengurangi ketimpangan wilayah secara optimal di Provinsi Jambi, namun studi dari Juliana & Soelistyo (2019) menemukan bahwa PAD berperan dalam mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Hasil yang berbeda menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap ketidaksetaraan regional dapat bergantung pada karakteristik masing-masing daerah.

Salah satu faktor penting yang membantu menjelaskan ketidaksetaraan regional adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan. Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05%, sedikit melambat dari 5,31% pada tahun 2022 (BPS, 2024). Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia masih

didominasi oleh daerah-daerah yang memiliki konsentrasi industri tinggi, terutama di Pulau Jawa. Sementara itu banyak wilayah di luar Jawa belum mengalami perkembangan yang setara, perbedaan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kuatnya pemusatan kegiatan industri di Pulau Jawa yang mendorong terjadinya aglomerasi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang cukup besar. Sebagian besar provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4-6%, namun terdapat beberapa provinsi yang menunjukkan laju pertumbuhan yang jauh melampaui angka rata-rata nasional. Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sekitar 21%, sedangkan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pertumbuhan ekonomi terendah yang berada di sekitar 1.8% (BPS, 2023), variasi pertumbuhan ekonomi antar provinsi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan menarik investasi. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, maka manfaat pembangunan cenderung dinikmati oleh wilayah yang telah berkembang lebih dahulu. Akibatnya, kesenjangan pembangunan antar wilayah berpotensi semakin melebar dan mendorong terjadinya ketimpangan wilayah.

Studi dari Robertus (2023) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi dalam menekan ketimpangan wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah, semakin besar peluang terciptanya pemerataan pembangunan karena manfaat aktivitas ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat dan wilayah yang lebih luas. Sedangkan studi lain dari Santoso et al. (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan disparitas pembangunan antar provinsi di Indonesia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu menciptakan pemerataan pembangunan, karena manfaat pertumbuhan lebih banyak dirasakan oleh daerah yang memiliki struktur ekonomi dan infrastruktur yang lebih maju. Akibatnya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar wilayah masih dapat terjadi meskipun perekonomian nasional terus mengalami pertumbuhan.

Hasil yang beragam dari studi sebelumnya menunjukkan bahwa dampak IPM, PAD, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan antar daerah belum memberikan hasil yang stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan ketimpangan wilayah masih perlu ditelaah lebih lanjut, terutama pada tingkat provinsi di Indonesia yang mempunyai karakteristik pembangunan yang beragam.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Indonesia. Meskipun pemerintah terus berupaya mendorong pemerataan pembangunan melalui berbagai kebijakan pembangunan daerah, kesenjangan antar provinsi merupakan salah satu persoalan pembangunan yang masih dihadapi Indonesia. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pengurangan kesenjangan antar wilayah ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan merata (Bappenas, 2020). Namun demikian, perbedaan kualitas sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh daerah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, akses terhadap pelayanan publik, serta peluang pembangunan ekonomi antar wilayah.

Penelitian yang mengkaji pengaruh IPM, PAD, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan pada seluruh provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan terbaru masih relatif terbatas, selain itu ketiga variabel tersebut memiliki hubungan yang erat dalam proses pembangunan daerah, namun belum banyak penelitian yang mengintegrasikannya dalam satu model analisis dengan ketimpangan wilayah pada 34 provinsi di Indonesia sebagai fokus utama. Di sisi lain, periode 2017-2023 menjadi rentang waktu yang menarik untuk diteliti karena mencakup berbagai perubahan kondisi ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan yang cukup besar pada pola distribusi pendapatan dan kesejahteraan antar daerah.

Berdasarkan data panel dari 34 provinsi untuk periode tahun 2017-2023, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak kualitas modal manusia yang diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kapasitas fiskal daerah yang diproksikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah di Indonesia Tahun 2017-2023" penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terkait berbagai faktor penyebab kesenjangan antar wilayah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia tetap menjadi masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan, perbedaan capaian pembangunan antar wilayah menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi hasil pembangunan yang berpotensi menghambat tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia?
2. Bagaimana dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia?
3. Bagaimana dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia.
2. Menganalisis dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia.

3. Menganalisis dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada aspek akademis dan praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademik:

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dalam bidang ekonomi pembangunan, terutama mengenai isu disparitas wilayah di Indonesia. Selain berkontribusi pada pengembangan kajian akademik, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai hubungan antara IPM, PAD, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat ketimpangan wilayah antar provinsi. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan mengkaji topik serupa pada masa mendatang yang membahas pembangunan daerah dan pemerataan ekonomi menggunakan data panel.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memanfaatkan kesimpulan studi ini sebagai landasan untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih seimbang. Temuan studi ini memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat setempat, dan kualitas pembangunan manusia berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan antar daerah di Indonesia. Dengan mengetahui sejauh mana peningkatan IPM, PAD, dan Pertumbuhan Ekonomi berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah.